

Agenda Pemulihan UMKM Pascagempa

Mudrajad Kuncoro

Rekonstruksi rumah pascagempa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bisa dibilang relatif cepat. Demikian laporan Tim Teknis Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascagempa Bumi DIY dan Jateng di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan sejumlah menteri pada 26 Juni.

Dari total 176.399 rumah yang rusak berat di DIY, 79,73 persen telah dibangun kembali dan 20,17 persen dalam proses pembangunan. Dari total 104.084 rumah yang tidak layak huni di Jateng, 29,68 persen telah dibangun kembali, 70,3 persen dalam proses pembangunan. Hanya 0,1 persen korban gempa masing-masing di DIY dan Jateng yang belum mulai membangun rumah mereka kembali karena berbagai alasan teknis.

Selain rekonstruksi rumah, pemulihan sektor ekonomi produktif, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu diprioritaskan. Sensus Ekonomi 2006 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari 403.000 unit usaha di DIY ternyata 99 persen tergolong UMKM.

Namun, gempa tektonik yang terjadi Mei 2006 dengan kekuatan 5,9 skala Richter terbukti tidak hanya memporandakan rumah, tetapi juga tempat, pabrik, bahan baku, barang jadi, barang siap ekspor, dan peralatan usaha. Sentra-sentra UMKM di Bantul dan Klaten terancam bangkrut dan tutup. Bank Dunia mengestimasi total kerusakan dan kerugian UMKM akibat gempa di wilayah ini sekitar Rp 7 triliun.

Ironisnya alokasi anggaran untuk merehabilitasi ekonomi UMKM ini justru mendapatkan persentase yang relatif minim. Hanya tersedia dana Rp 61,9 miliar pada tahun 2006 terdiri dari Rp 14,9 miliar dana dari APBN dan anggaran dekonsentrasi ditambah Rp 47 miliar dana dari pemerintah provinsi.

Dampak gempa tidak hanya dirasakan UMKM di Bantul, Kota Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul, dan Klaten, tetapi juga para pemasok bahan baku dan pasar utama produk UMKM.

Pengusaha industri batik di Pekalongan, Jawa Tengah, mengaku terancam menurun omzetnya karena mereka menjual sarung dan batik sekitar 20-30 persen ke DIY. Pelaku pariwisata di Bali khawatir karena selama ini sekitar 50-70 persen produk kerajinan yang dipasarkan di Pulau Dewata berasal dari Yogyakarta.

Masalah jangka pendek

Ada tiga masalah mendesak yang dihadapi rakyat DIY. Pertama, tingginya harga material bangunan. Kedua, kelangkaan tenaga kerja. Ketiga, kebutuhan modal kerja bagi UMKM untuk memulai kembali bisnisnya.

Tingginya harga material bangunan bisa dipahami. Pasalnya, lebih banyak permintaan daripada suplai material di pasar. Akibatnya, inflasi DIY tahun 2006 tercatat 10,41 persen, tertinggi di Pulau Jawa dan lebih tinggi daripada inflasi nasional yang hanya 6,6 persen.

Kelangkaan tenaga kerja di sektor UMKM terjadi karena para buruh tersedot dalam rekonstruksi rumah. Modal sosial yang kental membuat buruh yang bekerja di sentra-sentra

kerajinan banyak membantu tetangga dan saudara-saudara mereka membangun rumah dengan gotong royong.

Indikator ketenagakerjaan menunjukkan, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 5,24 persen pada tahun 2005 menjadi 5,32 persen pada tahun 2006. Dengan kata lain, jumlah pengangguran terbuka mencapai 95.148 orang. Besarnya nilai kerusakan yang dialami oleh sektor industri akibat gempa bumi mengakibatkan sejumlah besar unit usaha berkurang kapasitas produksinya.

Akibatnya, banyak UMKM yang mengalami, pertama, pengurangan jumlah buruh. Studi UNDP (2007) menunjukkan penurunan jumlah karyawan mencapai rata-rata 14 persen, yang mencapai 24 persen untuk usaha kecil dan 40 persen untuk usaha mikro. Kedua, UMKM terpaksa tidak dapat membayar kewajiban kredit (kredit macet).

Ancaman kredit macet

Menurut data Bank Indonesia (BI), total kredit bermasalah (non performing loan/NPL) sebesar Rp 336,9 miliar pada April 2007. Ini berarti persentase kredit bermasalah terhadap total kredit sebesar 4,47 persen. Bila dirinci, angka NPL di Bank Perkreditan Rakyat terhitung 10,34 persen, lebih tinggi daripada NPL bank umum yang hanya 3,71 persen.

Dampak gempa memang luar biasa bagi UMKM dan perbankan DIY. Kendati pertumbuhan ekonomi DIY masih positif 3,7 persen tahun lalu, sektor industri dan perbankan tercatat tumbuh negatif.

Di lapangan, berdasarkan pengaduan UMKM kepada Jogja Resque Team, pihak pemberi kredit (kreditor)—perbankan, leasing, pegadaian, koperasi, dan lintah darat—banyak yang mengancam untuk menyita aset UMKM.

Inilah yang membuat pusing pelaku UMKM DIY. Usaha bisnis UMKM belum pulih 100 persen, sementara ancaman penyitaan aset oleh para kreditor sudah di depan mata. Pelaku UMKM ini mengeluh mereka sekarang benar-benar UKM, alias "usaha kami hampir mati".

Peraturan BI (PBI) Nomor 8/10/PBI/2006 memberikan perlakuan khusus kepada UMKM korban gempa di DIY dan Jawa Tengah.

PBI ini intinya mengatur restrukturisasi kredit bagi Bank Umum dan BPR yang dilakukan untuk debitor yang terkena dampak bencana alam tersebut langsung dikategorikan dengan kualitas "lancar" selama tiga tahun sejak ketentuan ini berlaku.

Dalam praktik, PBI ini menguntungkan dari sisi perbankan karena laporan bank ke BI tampak "cantik", tidak ada kemacetan. Namun, bagi debitor UMKM, PBI ini hanya menunda masalah karena restrukturisasi kredit setelah 3-6 bulan diikuti denda dan rapelan selama UMKM dibebaskan dari pembayaran cicilan utang.

Jeritan UMKM ini didengarkan dengan saksama oleh para wakil rakyat di DPRD DIY. Usulan Jogja Resque Team untuk moratorium kredit bagi UMKM sampai tahun 2010 mendapat dukungan Komisi B DPRD DIY. Bahkan, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono (HB) X mendukung upaya moratorium selama tiga tahun bagi UMKM agar pelaku UMKM merasa tenteram dalam memulihkan bisnis mereka.

Strategi pemulihan UMKM di DIY dan Klaten perlu diimplementasikan secara simultan bersamaan dengan pembangunan rumah. Bila ditunda sampai semua rumah dibangun kembali, bisa jadi para buyers di luar daerah bencana dan luar negeri sudah kehilangan kepercayaan terhadap ikon dan produk Yogyakarta dan Klaten.

Inilah saatnya UMKM di daerah gempa untuk bangkit. Namun, jelas membutuhkan modal kerja, pendampingan usaha dan konsultan bisnis. Menko Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Negara BUMN, Menteri Negara Koperasi dan UKM, pemerintah daerah, bersama BI harus bertemu dalam satu meja untuk memprioritaskan rencana aksi pemulihan ekonomi produktif untuk DIY dan Klaten.

Akselerasi pemulihan UMKM, termasuk moratorium kredit bermasalah, adalah agenda yang ditunggu oleh pelaku ekonomi di DIY dan Klaten. Mari kita bangkitkan UMKM di DIY dan Jateng. Rumah dan pabrik boleh hancur, tetapi semangat berjuang dan berusaha pulih tidak boleh hancur. Mari berlomba membangun kembali kebersamaan. Bersama kita bisa?

Prof Mudrajad Kuncoro PhD *Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada; Anggota Jogja Resque Team; <http://www.mudrajad.com>*